

STUDI PENENTUAN TINGKAT KEKUMUHAN DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Theogive Hosea Tangkudung¹, Sonny Tilaar², & Rieneke Sela³

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi

²&³Staf Pengajar Prodi S1 Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

E-mail : theogivetangkudung@gmail.com

ABSTRAK

Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang dengan pesat. Seiring dengan peningkatan penduduk, prasarana, sarana dan utilitas umum yang kurang memadai mengakibatkan banyak masyarakat yang berada di kabupaten ini bermukim di tempat yang tidak sesuai standar yang merupakan permukiman kumuh. Kawasan kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menurut SK kumuh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016 terdapat 23 desa yang termasuk kedalam kawasan permukiman kumuh, permukiman kumuh ini memiliki tiga klasifikasi yakni, kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Berdasarkan klasifikasi inilah digabungkan dengan status lahan dan pertimbangan lain sehingga dapat disusun skala prioritas untuk penanganan permukiman kumuh serta bagaimana pola penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode yang digunakan adalah metode analisis multikriteria dengan 9 indikator yakni kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran serta status lahan dan pertimbangan lain. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 16 desa yang akan dilakukan pola penanganan peremajaan, 1 desa yang akan dimukimkan kembali dan 6 desa yang akan di lakukan penanganan dengan pola pemugaran.

Kata Kunci : Kawasan Permukiman Kumuh, Tingkat Kekumuhan, Skala Prioritas, Pola Penanganan.

ABSTRACT

South Bolaang Mongondow is one of the regencies located in North Sulawesi Province which is one of the regencies that is growing rapidly. Along with the increase in population, inadequate infrastructure, facilities and public utilities have resulted in many people in this district living in places that do not meet the standards, which are slums. Slum areas in South Bolaang Mongondow Regency according to the 2016 South Bolaang Mongondow Regency slum decree, there are 23 villages that are included in slum areas, these slums have three classifications, namely, heavy slums, medium slums and light slums. Based on this classification, it is combined with land status and other considerations so that a priority scale for handling slum settlements can be drawn up and how the pattern of handling slum settlements in Bolaang Mongondow Selatan Regency can be. The method used is a multi-criteria analysis method with 9 indicators, namely building conditions, environmental road conditions, environmental drainage conditions, drinking water supply conditions, wastewater management conditions, waste management conditions, fire protection conditions and land status and other considerations. Based on the results of the study, it was found that 16 villages

would be treated with a rejuvenation pattern, 1 village would be resettled and 6 villages would be treated with a restoration pattern.

Keyword : Slums, Slum Level, Priority Scale, slum settlement pattern

PENDAHULUAN

Berdasarkan dari hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh dalam lampiran SK Bupati Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan teridentifikasi luas permukiman kumuh sebesar 48,42 Ha untuk tujuh kecamatan dimana total luas kawasan permukiman menurut RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu seluas 808,98 Ha.

Kondisi permukiman kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan pengamatan penulis masih terdapat banyak ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan seperti kualitas lingkungan yang buruk, kondisi drainase yang kurang memadai, sistem pengolahan sampah yang belum terarah, ketidakteraturan bangunan rumah, tidak ada sistem pengolahan limbah serta proteksi kebakaran tentu hal ini merupakan suatu isu yang besar, bahkan menjadi urgensi dalam penanganannya.

Berdasarkan SK tersebut Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki 23 desa yang termasuk kedalam kawasan permukiman kumuh,

Oleh karena itu untuk mencapai amanat dari UU No.1 Tahun 2011 serta Permen PUPR No.14 Tahun 2018 dan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No 17 Tahun 2013 maka perlu adanya penentuan kualitas kekumuhan dan skala prioritas penangan kawasan permukiman kumuh agar dapat menjadi acuan atau pertimbangan pemerintah ataupun pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pola penanganan permukiman kumuh.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

(1)Menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

(2)Menyusun skala prioritas dan pola penanganan kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Permukiman Kumuh

Dalam UU No.1 Tahun 2011 permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak untuk dihuni disebabkan dikarenakan padatnya bangunan, tidak teraturnya bangunan dan kurang baiknya kualitas perumahan serta PSU yang tidak memadai atau memenuhi standar.

Adapun pengertian World Bank 1999 dalam Musthofa (2011) permukiman kumuh adalah bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan dimana kehidupan masyarakatnya yang memprihatinkan, hal ini bisa dilihat dari kepadatan penduduk dan bangunan yang tinggi, kondisi lingkungan hunian yang tidak layak, PSU yang ada di lingkungan yang tidak memenuhi standar dan tidak tercukupinya fasilitas umum dan sosial.

Sedangkan permukiman kumuh menurut pengertian Budiharjo pada tahun 1997 adalah suatu kawasan atau lingkungan hunian yang sangat tidak layak untuk huni, dikarenakan bangunan yang sangat padat dibandingkan dengan luas lahan yang terbatas, kawasan berdiri pada lahan yang bukan peruntukannya, rawan akan penyakit-penyakit sosial seperti kriminalitas dan permasalahan lingkungan, dan juga bangunan yang memiliki kualitas yang kurang baik, tidak terlayani prasarana lingkungan yang mencukupi sehingga mengancam kehidupan dan penghidupan penghuninya.

Kriteria dan Penilaian Permukiman

Kumuh

Didalam Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) kriteria penilaian untuk hasil dari identifikasi permukiman kumuh yaitu tingkat kekumuhan, Status lahan, dan pertimbangan lain sebagai berikut

Tingkat Kekumuhan

Tabel 1 Parameter Tingkat Kekumuhan

No	Kriteria	Indikator
1	Kondisi bangunan gedung	Ketidakteraturan Bangunan
		Tingkat Kepadatan Bangunan
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
2	Kondisi jalan lingkungan	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk
3	Kondisi penyediaan air minum	akses aman air minum tidak tersedia
		kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
4	Kondisi drainase lingkungan	drainase lingkungan tidak tersedia
		drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
		kualitas konstruksi

		drainase lingkungan buruk
5	Kondisi pengelolaan air limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
		prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
6	Kondisi pengelolaan persampahan	prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis
		sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
7	Kondisi proteksi kebakaran	prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia
		sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Sumber : PERMEN PUPR No 14 Tahun 2018

Berdasarkan kriteria ini dapat ditentukan tingkat kekumuhan suatu permukiman kumuh dengan klasifikasi sebagai berikut

- 1) Kumuh Ringan;
- 2) Kumuh Sedang; dan
- 3) Kumuh Berat.

Status Lahan

Tabel 2 Parameter Status Lahan

No	Kriteria	Indikator
8	Legalitas lahan	Kejelasan Status Penguasaan Lahan
		Kesesuaian RTR

Sumber : PERMEN PUPR No 14 Tahun 2018

- 1) kejelasan status penguasaan lahan

Untuk menentukan status legal tidaknya tanah yaitu dimana status penguasaan lahan harus memiliki sertifikat hak atas tanah untuk tanah kepemilikan sendiri dan

kepemilikan pihak lain (termasuk tanah milik adat/ulayat) harus dengan bukti izin pemanfaatan tanah dengan pemegang hak atas tanah/lahan dan serta terdaftar di BPN.

- 2) Kesesuaian dengan RTR (Rencana tata ruang)

Legalitas lahan juga dilihat dari aspek kesesuaian dengan RTR yaitu kesesuaian penggunaan lahannya dibandingkan rencana tata ruang dengan kawasan permukiman kumuh.

Sehingga penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan dapat di klasifikasikan sebagai

- 1) Status Tanah Legal dengan nilai positif (+); dan
- 2) Status Tanah Ilegal/ tidak legal dengan nilai negatif (-).

Pertimbangan Lain

Dalam penilaian permukiman kumuh terdapat faktor diluar aspek fisik yang menjadi salah satu faktor dalam penilaian yaitu pertimbangan akan potensi, baik ekonomi, sosial maupun budaya. Pertimbangan akan lokasi permukiman, dan pertimbangan kondisi kependudukan. Pertimbangan lainnya dapat di dibedakan menjadi tiga klasifikasi yaitu :

- 1) Pertimbangan Lain Kategori Rendah dengan total nilai 1-5;
- 2) Pertimbangan Lain Kategori Sedang dengan total nilai 6-10; dan
- 3) Pertimbangan Lain Kategori Tinggi dengan total nilai 11-15.

Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh

Skala prioritas penanganan adalah pengelompokan permukiman kumuh kedalam berbagai klasifikasi prioritas penanganan dengan memperhatikan aspek

penilaian permukiman kumuh yaitu kondisi kekumuhan, kondisi legalitas tanah/lahan dan pertimbangan lain.

Pola Penanganan Permukiman Kumuh

Dalam upaya penanganan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh maka perlu adanya pola penanganan yang akan di terapkan pada lingkungan permukiman kumuh, dalam penanganannya terdapat 3 pola yang dapat di terapkan dengan tetap berdasarkan hasil penilaian permukiman kumuh yaitu kondisi/tingkat kekumuhan dan legalitas tanah/lahan.

a. Pemugaran

Pemugaran adalah kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tanpa ada pembokaran atau penataan ulang secara menyeluruh dan hanya untuk mengembalikan fungsi PSU seperti semula. Pola penanganan pemugaran dapat diterapkan bila tingkat kekumuhan ringan

No	Kriteria	Indikator
9	Pertimbangan lain	Nilai Strategis Lokasi
		Kependudukan
		Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

*Tabel 3 Parameter Pertimbangan Lain
Sumber : PERMEN PUPR No 14 Tahun 2018*

dengan status tanah yang legal.

b. Peremajaan

Peremajaan adalah upaya penanganan kumuh dengan melakukan pembongkaran dan penataan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) serta kawasan dan lingkungan permukiman kumuh. Pola penanganan peremajaan dapat diterapkan bila tingkat kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah yang legal.

c. Pemukiman Kembali

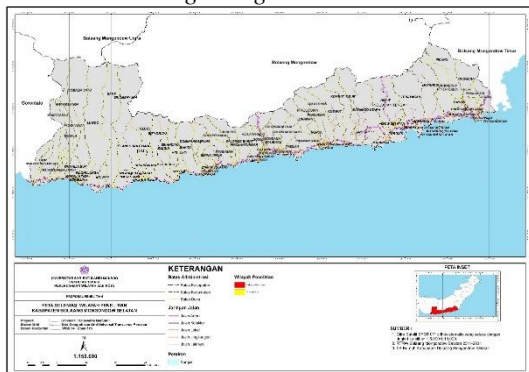
Pemukiman kembali adalah upaya penanganan kumuh yang dilakukan melalui pembangunan dan penataan kawasan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum di lokasi baru yang telah ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Pola penanganan pemukiman kembali diterapkan bila tingkat kekumuhan ringan hingga berat dengan status tanah ilegal.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 1 Peta Kawasan Kumuh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



Dalam penelitian ini fokus utamanya adalah pada kawasan permukiman khususnya kawasan permukiman kumuh yang teridentifikasi di 7 kecamatan dan 23 desa oleh SK Kumuh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016

Tabel 4 Identifikasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Desa	Kecamatan	Luas Identifikasi (Ha)
1	Lion	Posigadan	2,40
2	Mangadaa	Posigadan	2,25
3	Tonala	Posigadan	3,40

4	Momalia III	Posigadan	1,08
5	Iloheluma	Posigadan	3,06
6	Luwoo	Posigadan	2,40
7	Sinombayuga	Posigadan	3,04
8	Milangodaa Barat	Tomini	2,48
9	Biniha	Helumo	1,80
10	Biniha Selatan	Helumo	1,60
11	Dudepo Barat	Bolaang Uki	3,00
12	Dudepo	Bolaang Uki	3,33
13	Pinolantungan	Bolaang Uki	3,19
14	Salongo	Bolaang Uki	1,72
15	Salongo Timur	Bolaang Uki	1,20
16	Pintadia	Bolaang Uki	1,00
17	Tolondadu	Bolaang Uki	0,90
18	Tabilaa	Bolaang Uki	1,25
19	Ilomata	Pinolosian	1,75
20	Pinolosian Selatan	Pinolosian	0,88
21	Deaga	Pinolosian Tengah	0,85
22	Motandoi Selatan	Pinolosian Timur	4,05
23	Perjuangan	Pinolosian Timur	1,80
Jumlah			48,42 Ha

Sumber : SK Kumuh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Multikriteria dalam melakukan penentuan dari tingkat kekumuhan dan menyusun skala prioritas penanganan maka penelitian ini menggunakan metode analisis skoring atau pembobotan, dengan variabel, indikator dan parameter serta nilainya berdasarkan Permen PUPR No 14 Tahun 2018 yang terdiri dari

1. Kondisi Bangunan Gedung

2. Kondisi Jalan Lingkungan
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
4. Kondisi Drainase Lingkungan
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
7. Kondisi Proteksi Kebakaran.
8. Status Lahan
9. Pertimbangan Lain

Setelah itu diberikan bobot pada masing-masing parameter kondisi sesuai dengan tabel 3.2 sehingga dapat ditetapkan tingkat kekumuhannya yaitu:

1. Kumuh Ringan bila memiliki nilai 19-37
2. Kumuh Sedang bila memiliki nilai 38-59
3. Kumuh Ringan bila memiliki nilai 60-80

Kemudian dilakukan skoring berdasarkan Permen PUPR No.14 Tahun 2018 dalam menentukan tingkat kekumuhan serta skala prioritas penanganan

Tabel 5 Penentuan Skala Prioritas

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang						X	X	X	X	X	X							
16 – 37	Kumuh Ringan												X	X	X	X	X	X	
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X				X	X				X	X						
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X				X	X					X	X			
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X				X	X					X	X	
SKALA PRIORITAS PENANGANAN		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber : PERMEN PUPR No 14 Tahun 2018

Untuk menentukan tingkat kekumuhan dilakukan dengan cara jumlah nilai kondisi kekumuhan dari setiap masing masing wilayah penelitian di beri skor sesuai dengan variabel penelitian dan dijumlahkan untuk mendapatkan tingkat kekumuhan berdasarkan nilai dan kondisi yang sesuai dari tabel diatas berdarkan hasil tersebut maka dapat disusun dengan mengisi pembobotan hasil kondisi kekumuhan, legalitas lahan dan pertimbangan lain untuk

mendapatkan skala prioritas penanganan.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan analisis penentuan tingkat kekumuhan dan skala prioritas penanganan permukiman kumuh yang telah di lakukan diperoleh hasil sebagai berikut yang telah diurutkan sesuai dengan tingkat kekumuhannya.

Tabel 6 Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Desa	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
1	Salongo	Bolaang Uki	Kumuh Berat
2	Lion	Posigadan	Kumuh Sedang
3	Mangadaa	Posigadan	Kumuh Sedang
4	Luwoo	Posigadan	Kumuh Sedang
5	Pintadia	Bolaang Uki	Kumuh Sedang
6	Sinombayuga	Posigadan	Kumuh Ringan
7	Biniha	Helumo	Kumuh Ringan
8	Tonala	Posigadan	Kumuh Sedang
9	Momalia III	Posigadan	Kumuh Sedang
10	Iloheluma	Posigadan	Kumuh Sedang
11	Milangodaa Barat	Tomini	Kumuh Sedang
12	Dudepo Barat	Bolaang Uki	Kumuh Sedang
13	Ilomata	Pinolosian	Kumuh Sedang
14	Pinolosian Selatan	Pinolosian	Kumuh Sedang
15	Deaga	Pinolosian Tengah	Kumuh Sedang
16	Motandoi Selatan	Pinolosian Timur	Kumuh Sedang
17	Perjuangan	Pinolosian Timur	Kumuh Sedang
18	Biniha Selatan	Helumo	Kumuh Ringan
19	Dudepo	Bolaang Uki	Kumuh Ringan
20	Pinolantungan	Bolaang Uki	Kumuh Ringan
21	Salongo Timur	Bolaang Uki	Kumuh Ringan
22	Tolondadu	Bolaang Uki	Kumuh Ringan

No.	Desa	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
23	Tabilaa	Bolaang Uki	Kumuh Ringan

Sumber : Analisis Penulis 2021

Berikut ini merupakan hasil analisis yang dilakukan terhadap tingkat kekumuhan, status lahan dan pertimbangan lainnya sehingga mendapatkan skala prioritas yang guna dilakukan saat penanganan permukiman kumuh

Tabel 7 Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Desa	Kecamatan	Skala Prioritas
1	Salongo	Bolaang Uki	Prioritas 4
2	Lion	Posigadan	Prioritas 5
3	Mangadaa	Posigadan	Prioritas 5
4	Luwoo	Posigadan	Prioritas 5
5	Pintadia	Bolaang Uki	Prioritas 5
6	Sinombayuga	Posigadan	Prioritas 6
7	Biniha	Helumo	Prioritas 6
8	Tonala	Posigadan	Prioritas 8
9	Momalia III	Posigadan	Prioritas 8
10	Iloheluma	Posigadan	Prioritas 8
11	Milangodaa Barat	Tomini	Prioritas 8
12	Dudepo Barat	Bolaang Uki	Prioritas 8
13	Ilomata	Pinolosian	Prioritas 8
14	Pinolosian Selatan	Pinolosian	Prioritas 8
15	Deaga	Pinolosian Tengah	Prioritas 8
16	Motandoi Selatan	Pinolosian Timur	Prioritas 8
17	Perjuangan	Pinolosian Timur	Prioritas 8
18	Biniha Selatan	Helumo	Prioritas 9
19	Dudepo	Bolaang Uki	Prioritas 9

No.	Desa	Kecamatan	Skala Prioritas
20	Pinolantungan	Bolaang Uki	Prioritas 9
21	Salongo Timur	Bolaang Uki	Prioritas 9
22	Tolondadu	Bolaang Uki	Prioritas 9
23	Tabilaa	Bolaang Uki	Prioritas 9

Sumber : Analisis Penulis 2021

Dan berdasarkan hasil yang telah dikumpulkan dan dianalisis maka dapat ditmukan pola penanganan permukiman kumuh

Tabel 7 Pola Penanganan Permukiman Kumuh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Desa	Kecamatan	Pola Penanganan
1	Salongo	Bolaang Uki	Peremajaan
2	Lion	Posigadan	Peremajaan
3	Mangadaa	Posigadan	Peremajaan
4	Luwoo	Posigadan	Peremajaan
5	Pintadia	Bolaang Uki	Peremajaan
6	Sinombayuga	Posigadan	Peremajaan
7	Biniha	Helumo	Peremajaan
8	Tonala	Posigadan	Peremajaan
9	Momalia III	Posigadan	Peremajaan
10	Iloheluma	Posigadan	Peremajaan
11	Milangodaa Barat	Tomini	Peremajaan
12	Dudepo Barat	Bolaang Uki	Peremajaan
13	Ilomata	Pinolosian	Peremajaan
14	Pinolosian Selatan	Pinolosian	Peremajaan
15	Deaga	Pinolosian Tengah	Peremajaan
16	Motandoi Selatan	Pinolosian Timur	Peremajaan
17	Perjuangan	Pinolosian Timur	Pemukiman Kembali

No.	Desa	Kecamatan	Pola Penanganan
18	Biniha Selatan	Helumo	Pemugaran
19	Dudepo	Bolaang Uki	Pemugaran
20	Pinolantungan	Bolaang Uki	Pemugaran
21	Salongo Timur	Bolaang Uki	Pemugaran
22	Tolondadu	Bolaang Uki	Pemugaran
23	Tabilaa	Bolaang Uki	Pemugaran

Sumber : Analisis Penulis 2021

Pola Penangan merupakan upaya penangan kawasan permukiman kumuh terstruktur yang dilakukan jika suatu kawasan/ area memenuhi atau termasuk kedalam suatu kategori tertentu serta memiliki pedoman dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil analisis terhadap tingkat kekumuhan serta skala prioritas penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut.

Berdasarkan data dan hasil analisis terhadap tingkat kekumuhan serta skala prioritas penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saat ini memiliki tiga klasifikasi tingkat kekumuhan yaitu tingkat kekumuhan ringan, tingkat kekumuhan sedang dan tingkat kekumuhan berat. Tingkat kekumuhan ringan berada di 6 desa yaitu Desa Biniha Selatan, Desa Dudepo, Desa Pinolantungan, Desa Salongo Timur, Desa Tolondadu dan Desa Tabilaa. Tingkat kekumuhan sedang merupakan tingkat kekumuhan yang terbanyak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu berada

di Desa Lion, Desa Mangadaa, Desa Luwoo, Desa Pintadia, Desa Sinombayuga, Desa Biniha, Desa Tonala, Desa Momalia III, Desa Iloheluma, Desa Milangodaa Barat, Desa Dudepo Barat, Desa Ilomata, Desa Pinolosian Selatan, Desa Deaga, Desa Motandoi Selatan dan Desa Perjuangan.

2. Berdasarkan hasil analisis skala prioritas penanganan permukiman kumuh dikelompokkan kawasan permukiman kumuh yang masuk dalam pengelompokan skala prioritas menurut Peraturan Menteri PUPR No.14 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Terdapat 5 klasifikasi skala prioritas penanganan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu skala prioritas 4, skala prioritas 5, skala prioritas 6, skala prioritas 8 dan skala prioritas 9 dimana skala prioritas 4 merupakan prioritas tertinggi dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh dan skala prioritas 9 merupakan prioritas terendah dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh. Skala prioritas 4 terdiri dari satu desa yaitu Desa Salongo, lalu skala prioritas 5 terdiri dari empat desa yaitu Desa Lion, Desa Mangadaa, Desa Luwoo, Desa Pintadia kemudian skala prioritas 6 terdiri dari dua desa yaitu Desa Sinombayuga dan Desa Biniha, skala prioritas 8 terdiri dari sepuluh desa yaitu Desa Tonala, Desa Momalia III, Desa Iloheluma, Desa Milangodaa Barat, Desa Dudepo Barat, Desa Ilomata, Desa Pinolosian Selatan, Desa Deaga, Desa Motandoi Selatan, Desa Perjuangan dan yang terakhir skala prioritas 9 yang terdiri dari enam desa yaitu Desa Biniha Selatan, Desa Dudepo, Desa Pinolantungan, Desa Salongo Timur, Desa Tolondadu dan Desa Tabilaa.

3. Berdasarkan kriteria penentuan

pola penanganan permukiman kumuh terdapat tiga pola dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu penanganan dengan cara peremajaan dilaksanakan di 16 desa yaitu Desa Salongo, Desa Lion, Desa Mangadaa, Desa Luwoo, Desa Pintadia, Desa Sinombayuga, Desa Biniha, Desa Tonala, Desa Momalia III, Desa Iloheluma, Desa Milangodaa Barat, Desa Dudepo Barat, Desa Ilomata, Desa Pinolosian Selatan, Desa Deaga dan Desa Motandoi Selatan, kemudian penanganan permukiman kumuh dengan pola pemukiman kembali dilaksanakan hanya pada satu desa yaitu Desa Perjuangan, dan yang terakhir penanganan permukiman kumuh dengan pola pemugaran dilaksanakan pada 6 desa yaitu Desa Biniha Selatan, Desa Dudepo, Desa Pinolantungan, Desa Salongo Timur, Desa Tolondadu dan Desa Tabilaa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna memanfaatkan hasil penelitian ini sebaik-bainya, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintahan Bolaang Mongondow Selatan dapat melaksanakan penyusunan RP2KPKP di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar segera terdapat acuan teknis dalam penanganan permukiman kumuh karena belum terdapat Perda yang mengatur penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah dalam upaya penanganan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun
3. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan dilakukan penelitian selanjutnya

untuk dapat melakukan penelitian terhadap upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pola penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhabsyi, U., Warouw, F., & Sembel, A. 2019. *“Evaluasi Tingkat Kekumuhan Pada Kawasan Permukiman di Kecamatan Tuminting Kota Manado”*. Jurnal Spasial Vol. 6 No.1 Tahun 2019. Manado : Fakultas Teknik. Universitas Sam Ratulangi.
- Anonim, Peraturan Menteri PUPR No. 02/PRT/M/2016. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Anonim, Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.
- Anonim, SK. Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Asa, Diana Margaretha. 2015. *“Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Pengungrejo Kota Pasuruan”*. Skripsi Thesis Tahun 2015. Malang : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Institut Teknologi Nasional.
- Crysta, E., Budisusanto, Y. 2018. *“Analisis Tingkat Kekumuhan dan Pola Penanganannya Pada Lokasi Permukiman (Studi Kasus : Kelurahan Keputih, Surabaya)”*. Jurnal Vol. 13 No. 2 Tahun 2018. Surabaya : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Direktorat Pengembangan kawasan Permukiman. 2016 *“Paduan*

- Penyusunan RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan)*". Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.
- Kuswartojo, Tjuk 2005. "Perumahan dan permukiman Indonesia". ITB, Bandung.
- Robaka, Charlos Yosep Vinsen. 2019. "*Penentuan Prioritas Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Bentuk Partisipasi Masyarakat di kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar*". Skripsi Thesis Tahun 2019. Malang : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Institut Teknologi Nasional.
- Wiarni, S., Mononimbar, W., & Supardjo, S. 2018. "*Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur*". Jurnal Spasial Vol. 5 No. 1 Tahun 2018. Manado.